



Implementasi E-Government Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Melalui Web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau

Muh. Erik Syahdil¹⁾, Anwar Sadat²⁾, Nastia³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

eriksyahdil@gmail.com¹⁾, anwarsadat685@gmail.com²⁾, nastiatia567@gmail.com³⁾

Abstrak

Hak atas informasi publik telah diberikan kepada seluruh masyarakat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar semua badan publik mempublikasikan informasi publik yang tidak dikecualikan pada berbagai saluran informasi, termasuk situs web pemerintah daerah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana e-government digunakan untuk memfasilitasi pengungkapan informasi publik melalui situs web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Populasi dan sampel adalah petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau, penelitian ini juga mengakses situs web resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau. Indikator penelitian ini Informasi yang wajib disediakan, informasi yang wajib diumumkan, dan informasi yang wajib tersedia dapat dilihat di situs web resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government dapat digunakan untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengunjungi situs web resmi di <https://damkar.baubaukota.go.id>. Situs web tersebut menyediakan informasi mengenai operasional dan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran kepada masyarakat. Situs web tersebut juga menyediakan nomor telepon Dinas Pemadam Kebakaran apabila membutuhkan bantuan. Informasi kejadian yang telah ditangani oleh dinas secara lengkap dapat diakses oleh masyarakat di situs web resmi Dinas Pemadam Kebakaran.

Kata kunci: Implementasi, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik, Website Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau

Abstract

The right to public information has been granted to the entire community with the enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information (UU KIP). The KIP Law mandates that all public bodies publish non-threatening public information on various information channels, including local government websites. Thus, the purpose of this study is to determine how e-Government is used to facilitate the dissemination of public information through the Baubau City Fire and Rescue Service website. A qualitative approach was used in this study. The population and sample were Baubau City Fire Department officers, this study also accessed the official website of the Baubau City Fire Department. The indicators of this study Information that must be provided, information that must be announced, and information that must be available can be seen on the official website of the Baubau City Fire Department. The results of the study indicate that e-Government can be used to encourage public information disclosure. The public can visit the official website at <https://damkar.baubaukota.go.id>. The website provides information on the operations and performance of the Fire Department to the public. The website also provides the Fire Department telephone number if assistance is needed. Information on incidents that have been handled by the agency in full can be accessed by the public on the official website of the Fire Department.

Keyword: Implementation, E-Government, Public Information Disclosure, Website of the Baubau City Fire and Rescue Department

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu klausul dalam konstitusi Indonesia yang menjadi landasan pertanggungjawaban seluruh badan publik atas pelaksanaan fungsi pemerintahannya (Rahimallah & Ricky, 2023). Dorongan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, yang mensyaratkan adanya transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kebijakan publik, menjadi pendorongnya. Seluruh lembaga pemerintah wajib memberikan layanan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (Riswati, 2021).

Salah satu kebutuhan terpenting dalam kehidupan modern adalah informasi (Misbahrudin, 2014). Semua aspek kehidupan telah dipengaruhi oleh penggunaannya, terutama karena mekanisme distribusinya menjadi sangat kompleks karena kemajuan teknologi informasi (Ngafifi, 2014). Teknologi informasi telah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara industri sehingga mereka dapat secara mandiri memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk mempelajari lebih lanjut (Suri, 2019).

Kita hidup di era keterbukaan informasi yang sangat penting, dan kemampuan menguasai informasi menentukan kecerdasan dan arah pembangunan nasional (Syeh et al., 2022). Pemerintah wajib menegakkan hak dasar warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak asasi manusia yang bersumber dari hak asasi manusia adalah kebebasan untuk memperoleh pengetahuan (Murthada Murthada & Seri Mughni Sulubara, 2022).

Minat publik yang tinggi terhadap informasi yang terkait dengan ketersediaan sistem informasi yang memadai merupakan ciri khas era teknologi informasi yang berkembang pesat (Kurniawatik et al., 2021). Hal ini merupakan hasil dari semakin diakuinya masyarakat bahwa pengetahuan sangat penting bagi keberadaan manusia (Purnama, 2021). Karena komunikasi yang ingin disampaikan kepada pelanggan akan terganggu dan terhambat tanpa informasi yang memadai, fungsi informasi telah berkembang pesat hingga saat ini.

Media memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi publik, selain langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dalam sistem kelembagaan dan manajemen, dimulai dengan transparansi kebijakan dan peningkatan kesadaran publik untuk berpartisipasi. Hal ini terutama berlaku pada TIK, khususnya E-Government (Wirawan, 2020).

Teknik pemanfaatan TIK yang paling mutakhir disebut e-government. Secara umum, e-government mengacu pada cara organisasi pemerintah memanfaatkan TIK yang paling mutakhir untuk memberikan kemudahan akses informasi dan layanan publik kepada warga negara dan sektor swasta, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan peluang partisipasi demokratis (Sugiono, 2021). Berdasarkan pernyataan di atas, penyediaan layanan dan informasi publik menjadi landasan pemanfaatan e-government yang dipandang sebagai cara yang bermanfaat dan efisien dalam memanfaatkan teknologi berbasis internet untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah (Yohanes et al., 2013).

Pembagian informasi publik merupakan salah satu elemen kunci demokrasi yang melindungi kebebasan dan hak asasi manusia (Febriananingsih, 2012). Pembagian informasi publik untuk melindungi hak setiap orang untuk tahu merupakan salah satu prinsip utama demokrasi. Kapasitas untuk belajar merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting karena kebebasan tidak dapat terwujud tanpanya (Indah & Hariyanti, 2018). Kecenderungan untuk menyembunyikan fakta dari publik harus diperhatikan karena keberadaan demokrasi bergantung pada ketersediaan informasi (Kristiyanto, 2016). Untuk mendorong keterbukaan informasi publik, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang selama ini sulit diperoleh masyarakat baik di lingkungan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah (Saputra, 2019). UU KIP mendorong terwujudnya keterbukaan informasi di seluruh instansi pemerintah dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang diharapkan dapat mengubah paradigma pengelolaan informasi publik dari yang bersifat tertutup menjadi terbuka (Febriananingsih, 2012). Pasal 1 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Republik Indonesia, Informasi Publik adalah informasi yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirimkan, dan/atau diterima oleh Badan Publik tentang penyelenggara negara dan penyelenggara Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Transparansi pemerintahan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong seluruh badan publik untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, cepat, terjangkau dan sederhana. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi unsur tanggung jawab, keterbukaan, dan partisipasi, maka lahirlah UU KIP (Suryani, 2017).

Substansi aktual informasi memegang peranan penting dalam penerapan UU KIP oleh badan publik (Noor, 2019). Meskipun demikian, masih ada beberapa organisasi publik yang menyediakan informasi yang tidak sesuai dengan kewajiban undang-undang, seperti menyediakan informasi yang tidak memadai atau bersifat umum (Perdana et al., 2018).

Berdasarkan UU KIP, semua informasi publik wajib disampaikan melalui situs web resmi badan publik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan organisasi publik di bawah Pemerintah Kota Baubau yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Situs web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau memiliki desain yang sangat baik, mudah digunakan, dan memberikan informasi yang bermanfaat. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi e-government dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau. Adapun tujuan dalam penelitian untuk mengetahui implementasi e-government dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui situs web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau.

METODE

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Karena dapat memberikan penjelasan yang mendalam tentang perilaku subjek penelitian dan hubungan yang erat dengan penggunaan e-government untuk membantu dalam keterbukaan informasi publik melalui situs web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau. Tujuan dari teknik penelitian kualitatif, menurut perspektif Moleong dalam (Arikunto, 2010), adalah untuk menggambarkan dan memahami sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau serta mengakses situs web resmi lembaga tersebut. Untuk mengumpulkan informasi yang mendalam sesuai dengan topik penelitian, pendekatan pengumpulan data penelitian berikut digunakan:

1. Observasi, merupakan salah satu metode yang efektif dan akurat untuk mengumpulkan item yang diamati secara langsung, yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data operasional.
2. Wawancara adalah teknik atau instrumen pengumpulan data di mana partisipan, yang menjadi topik wawancara, ditanyai sejumlah pertanyaan oleh peneliti yang bertindak sebagai pewawancara.
3. Dokumentasi atau berkas (baik catatan tradisional maupun elektronik), buku, esai, laporan, notulen rapat, cetakan surat kabar, gambar, atau arsip lainnya semuanya dapat digunakan untuk menyimpan materi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi publik adalah informasi yang dibuat, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik mengenai perencanaan dan pengelolaan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi mengenai kepentingan publik. Keterbukaan informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan dedikasi pemerintah dalam mendemokratisasi pemerintahan dan menerapkan standar tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan (transparansi) pemerintah kepada publik merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur utama demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia. Pembagian informasi publik untuk melindungi hak setiap orang untuk mengetahui merupakan salah satu prinsip utama demokrasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara umum diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang selama ini sulit diperoleh masyarakat. UU KIP mendorong keterbukaan informasi di seluruh lembaga pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang diharapkan dapat membawa perubahan paradigma pengelolaan informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang terbuka.

Dalam konteks penyampaian informasi publik, media dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara dan dengan berbagai infrastruktur serta kapasitas yang dimiliki. Pemanfaatan situs web resmi bagi yang telah memilikinya merupakan salah satu syarat bagi badan publik milik negara. Berdasarkan penelitian ini, situs web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau menggunakan e-government untuk memfasilitasi pengungkapan informasi publik, khususnya:

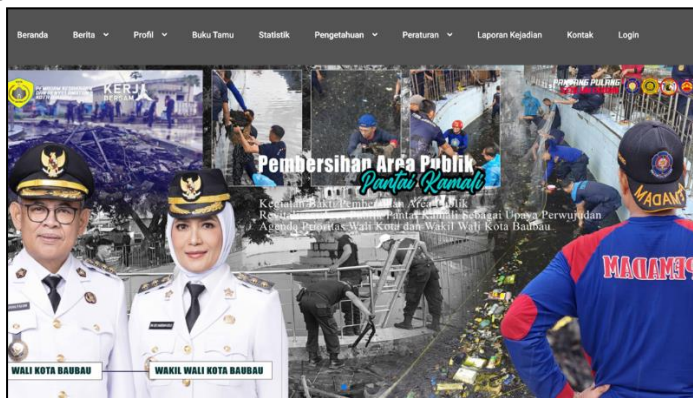
Infiriasi yang Waji Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong seluruh badan publik untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat waktu, murah, dan mudah, mendorong terwujudnya keterbukaan pemerintah. Undang-Undang KIP dibentuk sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memuat ciri-ciri akuntabilitas, keterbukaan, dan pelibatan masyarakat. Seluruh informasi publik wajib disampaikan melalui situs web resmi Badan Publik sesuai dengan Undang-Undang KIP. Sebagai organisasi publik di bawah Pemerintah Kota Baubau, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai penyelenggara negara dan tata kelola, penyelenggara dan tata kelola badan publik lainnya, dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dihasilkan, disimpan, disebarluaskan, dan/atau diterima oleh badan publik merupakan informasi publik. Setiap badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala. Menurut definisinya, informasi publik meliputi informasi mengenai badan publik serta informasi mengenai kegiatan dan kinerjanya.

Informasi publik dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Situs web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau dirancang dengan baik, menerima dan menanggapi permintaan informasi, serta diperbarui dengan berita dan informasi secara berkala. Menurut peneliti, berita terkini yang dimuat di situs web <https://damkar.baubaukota.go.id> sudah baik.

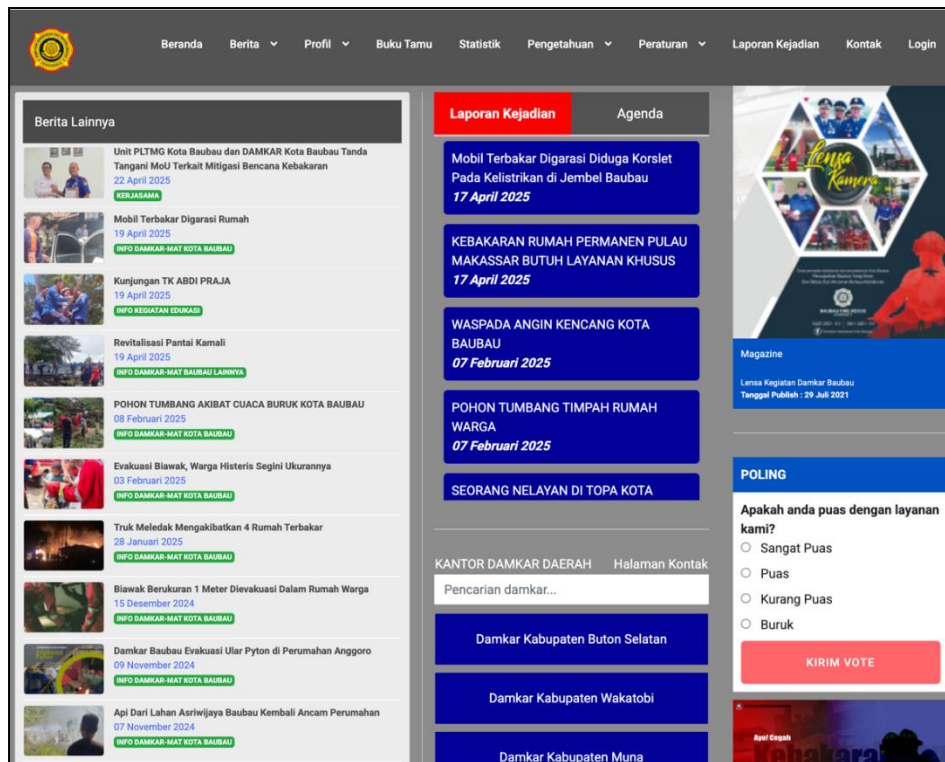
Gambar 1. Portal Damkar Kota Baubau



Sumber: <https://damkar.baubaukota.go.id>

Damkar Kota Baubau bertugas mengelola seluruh aspek sistem situs web, mulai dari menjaga keamanan situs web dan desain halaman, melakukan pemutakhiran berita dan informasi secara berkala pada halaman situs web, serta menanggapi permintaan informasi melalui situs web. Peneliti menemukan bahwa situs web <https://damkar.baubaukota.go.id> telah memberikan informasi berita terbaru yang telah ditambahkan.

Gambar 2. Informasi Berita Laporan Kejadian Situs Resmi Damkar Kota Baubau



Sumber: Hasil penelitian

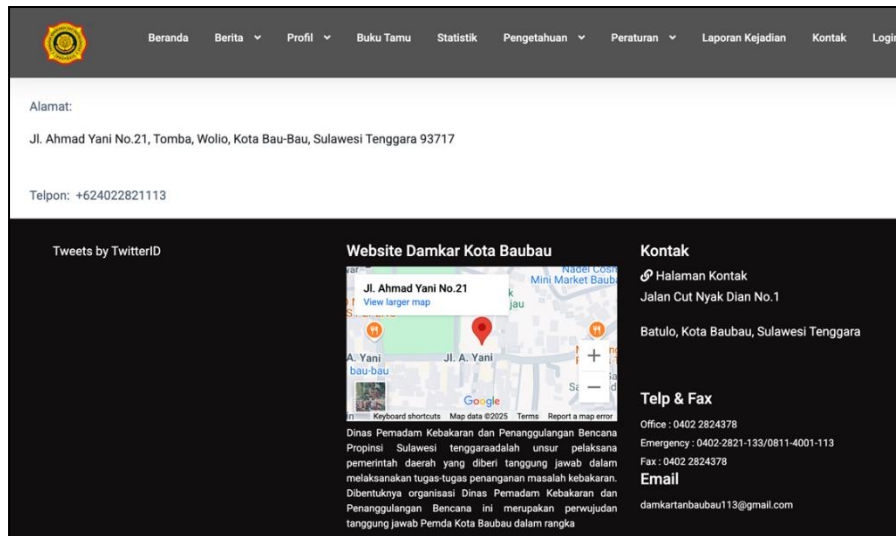
Badan publik harus memberikan informasi tentang kinerja dan operasinya agar Dinas Pemadam Kebakaran dapat memberikan layanan informasi kepada masyarakat, dan situs web Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau dapat membantu masyarakat secara online dan memudahkan pencarian informasi.

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pembagian informasi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa merupakan langkah awal dalam mengambil tindakan atau merencanakan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana, seperti kebakaran. Setiap pengguna yang membutuhkan informasi dapat mengaksesnya, semua informasi tersedia untuk umum. Informasi yang dapat membahayakan ketertiban umum dan nyawa banyak orang segera diumumkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau. Peningkatan kualitas implementasi situs web sangat penting mengingat peran penting media informasi elektronik, khususnya situs web lembaga, dalam penyampaian informasi. Hal ini dikarenakan situs web merupakan alat yang sangat ampuh untuk promosi publik selain sebagai sarana untuk berbagi informasi. Salah satu sumber informasi publik lembaga adalah situs webnya, yang menyediakan berbagai informasi rinci tentang kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau.

Nomor-nomor darurat dan detail kontak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Baubau tersedia bagi siapa saja yang ingin memanfaatkan layanan mereka melalui situs web ini dapat diakses. Mengetahui nomor-nomor darurat akan sangat membantu masyarakat karena nomor-nomor tersebut dapat segera dihubungi jika terjadi kebakaran atau keadaan lain yang memerlukan personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Baubau.

Gambar 3. Kontak Damkar Kota Baubau



Sumber: Hasil penelitian

Sebaiknya cantumkan nomor darurat atau nomor pemadam kebakaran agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Masyarakat dapat melaporkan masalah tanpa harus datang langsung ke kantor jika mereka mengetahui nomor-nomor ini. Situs web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau memudahkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan kecamatan menemukan nomor darurat dinas tersebut. Nomor-nomor tersedia di webs Damkar Kota Baubau. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau telah memperluas layanannya seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi dengan memposting laporan insiden di situs web resminya dan menawarkan nomor darurat kepada siapa pun yang membutuhkan bantuan kapan saja.

Gambar berikut menunjukkan bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau memberitahukan kepada masyarakat tentang laporan insiden yang telah ditangani petugas agar masyarakat mengetahui pertolongan-pertolongan yang telah ditangani Damkar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau dapat membantu dengan berbagai tugas selain menanggapi situasi kebakaran.

Gambar 4. Informasi Kejadian yang Telah Ditangani Damkar Kota Baubau

No	Jenis Penanganan	Alamat Kejadian	Nama Korban	Nama Pelapor	Respon Time
1	Mobil Terbakar di Garasi	Bataraguru	Jembel	Warga	6 Menit
2	Kebakaran Rumah Semi Permanen	Pulau Makassar	PUMA	Warga	10
3	Kebakaran Lahan	BWI Kec Wolio	2 Hektra lahan kosong, tidak ada korban jiwa	Warga	7 Menit
4	Kebakaran	Tanggul Bataraguru Kec wolio	Objek Dapur Rumah Tidak Ada Korban Jiwa	Ahmad	5 Menit
5	Evakuasi Ular	BTN Inulgi BWI	Tidak Ada Korban	Dian Minuswari Yunus	7 Menit
6	Evakuasi Biawak	Jalan Kepala	Tidak Ada Korban	MAS ATI MUJIS	5 Menit
7	Evakuasi Kucing	Lorong Depot Pertamina Kel Katobengke	Kucing	LA SALIMU	7 Menit
8	Kebakaran Rumah	Kadolo-Kokulukuna	IRMAWATI	MASYARAKAT	5 Menit
9	Kebakaran Rumah	Kanaakea - Batupaoero	LA ODE RAMU	MASYARAKAT	3 Menit

Sumber: Hasil penelitian

Gambar di atas menggambarkan bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau mendistribusikan informasi laporan kejadian di Kota Baubau sesuai kewenangannya. Situs web tersebut menyediakan kontak resmi yang dapat dihubungi dan informasi mengenai kejadian yang telah ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau telah melakukan tugasnya dengan baik dalam mendistribusikan informasi dengan segera.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau memiliki prosedur dan peraturan yang berlaku untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai lembaga publik, termasuk menyediakan informasi publik bagi mereka yang membutuhkannya. Situs web resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau menyediakan informasi berikut kepada publik setiap saat, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di web damkar:

Tabel 1. Informasi Web Damkar Kota Baubau

No	Jenis Informasi Web Damkar	Publikasi
1	Profil Damkar Kota Baubau	Tersedia dalam web
2	Berita kegiatan Damkar	Tersedia dalam web
3	Statistik kebakaran berdasarkan kejadian	Tersedia dalam web
4	Pengetahuan keselamatan, pola pemadaman, sandi pemadaman, simulasi penanganan dan pencegahan kebakaran	Tersedia dalam web
5	Laporan kejadian	Tersedia dalam web
6	Kontak/Nomor Damkar	Tersedia dalam web

Sumber: Hasil penelitian

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa website resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau yang berfungsi sebagai penyebar informasi kepada masyarakat umum sudah baik dan lengkap, semua informasi tersedia di sana.

SIMPULAN DAN SARAN

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendorong keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan e-government. Situs web resmi Dinas Pemadam Kebakaran dapat diakses melalui <https://damkar.baubaukota.go.id>. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kinerja dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran melalui situs web Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau yang senantiasa diperbarui. Selain itu, situs web tersebut juga mencantumkan nomor telepon Dinas Pemadam Kebakaran sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menghubunginya dengan mudah. Situs web resmi Dinas Pemadam Kebakaran memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi karena menyediakan laporan kejadian secara lengkap.

Saran untuk meningkatkan informasi publik melalui web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah memastikan website mudah diakses dan informasinya jelas. Website juga bisa menyediakan fitur kotak saran atau formulir online untuk mendapatkan masukan dari publik. Selain itu, pengingat tentang layanan dan program penting, serta pembaruan berkala tentang kegiatan dan pengumuman, dapat meningkatkan keterlibatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/59/11>
- Kurniawatik, A. T., Khaerunnisa, K., & Tasya, T. (2021). Melek Information and Communications Technology (ICT) Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi. *Cebong Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.35335/cebong.v1i1.3>
- Misbahrudin, A. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Rumah Tangga Untuk Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v18i1.7>
- Murthada Murthada, & Seri Mughni Sulubara. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik : Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a2>
- Perdana, A., Asrinaldi, & Asmawi. (2018). Implementasi UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID). *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 72–87.
- Purnama, R. (2021). Model perilaku pencarian informasi (analisis teori perilaku pencarian informasi menurut David Ellis). *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 9(1), 10. <https://doi.org/10.18592/pk.v9i1.5158>
- Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Riswati. (2021). Implementasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis digitalisasi teknologi di indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, 1–15.
- Saputra, W. (2019). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 14(01), 31–48. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.102>
- Sugiono, S. (2021). Peran E-Government dalam Membangun Society 5.0: Tinjauan Konseptual terhadap Aspek Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. *Matra Pembaruan*, 5(2), 115–125. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.115-125>
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177–187. <https://doi.org/10.46937/17201926848>
- Suryani, D. A. (2017). Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 35. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11736>



- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209. <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218>
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>
- Yohanes et.al. (2013). The Implementation Strategy of Information Technology. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, 1–22.